




Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

5.3.7 SOP Pengajuan Izin Kantor Cabang Koperasi

 <b>Pemerintah Provinsi Jawa Timur</b> <b>Dinas Koperasi dan UKM</b>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	8 Februari 2023
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Koperasi dan UKM  <u>Dr. Andromeda Qomariah, M.M.</u> NIP. 196801171994032003
<b>Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan</b>	Nama SOP	:	Pengajuan Izin Kantor Cabang Koperasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>9. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi</li> <li>11. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi</li> <li>12. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>2. Mengetahui semua proses pelayanan secara umum</li> <li>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</li> <li>4. Memahami peraturan perundangan mengenai pelayanan publik</li> </ol>



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi</li> <li>14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi</li> <li>15. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi</li> <li>16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</li> <li>17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM</li> <li>18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur</li> <li>20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha</li> <li>21. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/31/KPTS/013/2022 Tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur</li> </ol>	
<b>Keterikatan SOP</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengajuan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)</li> <li>2. SOP Fasilitasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) KUMKM</li> <li>3. SOP Pelayanan Konsultasi Hukum KUKM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Internet</li> <li>3. Alat Tulis</li> <li>4. Printer</li> <li>5. Jaringan Internet</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>
<p>Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan baik maka akan terjadi keterlambatan penerbitan ijin.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Koperasi</li> <li>2. Data Pendukung Lain</li> </ol>



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

SOP Pengajuan Izin Kantor Cabang Koperasi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim Verifikator DPMPTSP	Tim Verifikator 2 (Dinas KUKM Jatim)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan Registrasi Akun untuk aplikasi Perijinan JOSS Di Website : DPMPTSP/JOSS					Surat Pemohonan	15 Menit	Surat Pemohonan	
2.	Melakukan Permohonan Penerbitan izin yang di inginkan dilengkapi dengan pengunggahan dokumen elektronik sesuai persyaratan					Dokumen Persyaratan Perijinan	20 Menit	Dokumen Persyaratan Perijinan	
3.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan					Dokumen Persyaratan Perijinan	30 Menit	Dokumen Persyaratan Perijinan	
4.	Melakukan pemeriksaan Lapangan					Dokumen Persyaratan Perijinan	1 Hari	Dokumen Persyaratan Perijinan	
5.	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan/ Rekomendasi Penerbitan / Penolakan Izin					Dokumen Persyaratan Perijinan	20 Menit	Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen	
6.	Memberikan Persetujuan pemenuhan Komitmen					Dokumen Persyaratan Perijinan	15 Menit	Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen	
7.	Menyerahkan berita acara yang telah disetujui kepada Tim Verifikator DPMTSP					Dokumen Persyaratan Perijinan, berita acara	15 menit	Berita acara telah diserahkan	
8.	Memverifikasi Penerbitan izin berdasarkan rekomendasi dari Dinas					Dokumen Persyaratan Perijinan	15 Menit	Dokumen Persyaratan Perijinan	



Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Jawa Timur

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim Verifikator DPMPTSP	Tim Verifikator 2 (Dinas KUKM Jatim)	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
9.	Mencetak Dokumen izin yang telah diterbitkan dengan pembubuhan tanda tangan elektronik					Dokumen Persyaratan Perijinan	10 Menit	Dokumen Persyaratan Perijinan	
10.	Meng-upload dokumen di OSS RBA					Dokumen Persyaratan Perijinan	20 Menit	Dokumen Persyaratan Perijinan	